

## ANALISIS EFISIENSI APBN ERA PRABOWO: KAJIAN EKONOMI DAN ANALISIS SENTIMEN PUBLIK

**Retta Farah Pramesti**

Universitas Padjadjaran

retta.farah@unpad.ac.id

**Asno Azzawagama Firdaus**

Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

asnofirdaus@gmail.com

**Khairanis Yulita**

Universitas Padjadjaran

Khairanis.yulita@unpad.ac.id

**Mazraatin Thoyyibah**

Universitas Airlangga

mazraaten.thoyyibah-2022@feb.unair.ac.id

**Abstrak** Studi ini mengevaluasi efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, khususnya penghematan Rp306,69 triliun yang dialokasikan untuk mendanai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan metode campuran digunakan, menggabungkan analisis kuantitatif (korelasi Pearson dan K-Means Clustering pada data anggaran dan efisiensi dari 78 kementerian/lembaga) dengan analisis sentimen kualitatif-komputasional dari media sosial X (Twitter) menggunakan algoritma Naïve Bayes. Hasil menunjukkan korelasi yang sangat kuat ( $r = 0,957$ ) antara ukuran anggaran dan efisiensi, tetapi hanya 7 kementerian yang masuk dalam kluster efisiensi tinggi. Analisis sentimen mengungkapkan persepsi publik yang dominan positif terhadap kebijakan MBG, meskipun bias model hadir karena ketidakseimbangan data. Studi ini merekomendasikan lima strategi utama: memperkuat penganggaran berbasis kinerja, memantau program MBG, mengoptimalkan teknologi manajemen anggaran, mendorong partisipasi publik, dan mendiversifikasi pembiayaan inovatif. Secara keseluruhan, temuan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola fiskal yang tidak hanya efisien tetapi juga adaptif dan inklusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci** *Efisiensi Anggaran, APBN 2025, Makanan Bergizi Gratis, Analisis Sentimen, Pengelompokan K-Means.*

### PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal berperan penting dalam memastikan efisiensi alokasi anggaran negara sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal, merepresentasikan prioritas pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, fenomena efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun lintas kementerian menjadi sorotan publik, seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalihkan sebagian besar belanja negara untuk membiayai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar di Indonesia, sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2025, yaitu “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan*

*Berkelanjutan*” (Kemenkeu, 2024). Namun, penghematan anggaran yang mencapai kurang lebih 8% dari total belanja negara ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas alokasi anggaran serta dampaknya terhadap keberlanjutan program-program kementerian lainnya. Menurut Margono (2006) efisiensi merupakan langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam konteks negara efisiensi teknis berperan krusial karena peningkatan efisiensi di sektor-sektor industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat daya saing internasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. APBN Tahun 2025 mempertimbangkan faktor perekonomian global karena akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan, akselerasi transformasi perlu ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan *green economy* serta penguatan kebijakan fiskal dan struktural secara menyeluruh.

**Tabel 1. Keseimbangan Primer dan Defisit APBD (%) dalam APBN 2025**

Tahun	Keseimbangan Primer (Triliun Rp)	Defisit thd PDB (%)
2021	-633.1	-5.7
2022	-434.4	-4.5
2023	-38.5	-2.27
2024	-25.5	-2.29
2025	-63.3	-2.53

**Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)**

Sesuai Tabel 1, Keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara tercermin dalam postur APBN 2025 yang menargetkan defisit sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 2,29%. Data historis menunjukkan tren penurunan defisit secara signifikan sejak tahun 2021, di mana pada saat itu defisit APBN mencapai 5,7% terhadap PDB dengan keseimbangan primer sebesar -Rp633,1 triliun. Pada tahun 2023 dan 2024, keseimbangan fiskal Indonesia semakin mendekati titik netral, dengan defisit terhadap PDB turun hingga di kisaran 2,27%–2,29%, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan global.

Namun, pada tahun 2025, terdapat sedikit pelebaran defisit primer menjadi -Rp63,3 triliun dari sebelumnya -Rp25,5 triliun. Meskipun demikian, rasio defisit terhadap PDB tetap dijaga dalam batas aman sesuai dengan kerangka pengelolaan fiskal jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi anggaran dan alokasi ulang belanja negara, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, tetap dilakukan dengan menjaga disiplin fiskal. Perluasan program sosial seperti MBG serta akselerasi agenda transformasi ekonomi diarahkan untuk tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Oleh karena itu, efektivitas dari kebijakan efisiensi ini perlu dievaluasi lebih lanjut, baik dari sisi output kementerian maupun dari persepsi publik, guna memastikan bahwa belanja negara benar-benar digunakan secara optimal dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi terhadap efisiensi kebijakan penghematan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi ulang anggaran tidak justru menghambat pelayanan publik maupun pembangunan yang sedang berjalan. Sejalan dengan pendapat Juhro (2022), kebijakan fiskal yang efektif dan harmonis tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis korelasi dan klusterisasi (*clustering analysis*) untuk mengkaji hubungan antara besaran pagu anggaran dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Pendekatan ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai pola efisiensi, serta memungkinkan pengelompokan kementerian ke dalam kluster-kluster berdasarkan karakteristik efisiensinya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi kementerian mana saja yang melakukan efisiensi secara optimal dan mana yang masih belum maksimal dalam merespons kebijakan penghematan tersebut.

Selain menilai efisiensi internal antar-kementerian, penelitian ini juga menelaah persepsi masyarakat terhadap kebijakan efisiensi APBN melalui analisis sentimen berbasis data media sosial X (Twitter). Dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes, sentimen publik diklasifikasikan menjadi positif, negatif, atau netral. Pendekatan ini dinilai relevan, mengingat media sosial telah menjadi ruang diskusi yang aktif dan representatif terhadap respons publik atas kebijakan pemerintah (Wongkar et al, 2019).

Adapun program makan bergizi gratis sendiri merupakan inisiatif pemberian makanan bernutrisi di sekolah dan pesantren yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas gizi pelajar. Menurut Prabowo Subianto, sebanyak 25% anak-anak Indonesia tidak mendapatkan asupan bergizi setiap hari. Namun, hingga pertengahan 2024 belum terdapat kerangka konseptual formal yang dipublikasikan pemerintah sebagai landasan pelaksanaan program ini (CISDI, 2024; Andin et al., 2025). Hal ini semakin menambah urgensi penelitian terhadap efektivitas kebijakan efisiensi yang menjadi sumber pendanaan utama program tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pola efisiensi anggaran lintas kementerian setelah penghematan sebesar Rp 306 triliun, dengan menggunakan analisis korelasi dan klusterisasi untuk mengidentifikasi hubungan dan pola antar-unit kerja pemerintah. Kedua, bagaimana persepsi masyarakat di media sosial terhadap kebijakan efisiensi ini, melalui klasifikasi sentimen publik dengan algoritma Naïve Bayes. Ketiga, apakah kebijakan pengalihan anggaran menuju program Makan Bergizi Gratis sudah mencerminkan optimalisasi fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa mengorbankan program-program penting lainnya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berbasis data bagi pengambil kebijakan dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan pengelolaan instrumen fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan perpajakan (Madjid, 2012). Sudirman (2017) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mencapai perekonomian yang lebih stabil dan pembangunan negara yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal merupakan sebuah fondasi negara untuk mencapai pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan dengan menyoroti tiga fungsi utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan di Indonesia merupakan bagian tugas dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan setingkat eselon I. Peran strategis BKF meliputi kebijakan pendapatan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara, ekonomi makro, sektor keuangan, pembiayaan, dan juga kebijakan di bidang kerja sama bilateral. Kebijakan fiskal Indonesia Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Rekomendasi kebijakan fiskal disusun BKF berdasarkan bukti dan telaah teori yang relevan dengan tiga pokok rekomendasi yaitu kebijakan makro dan sektor keuangan, kebijakan pendapatan negara, dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Strategi kebijakan fiskal dapat ditempuh dalam skala jangka waktu pendek dan menengah sampai panjang. Strategi jangka pendek kebijakan fiskal di Indonesia menyoroti program prioritas dan unggulan saat ini yang sedang berlanjut, yaitu pendidikan dan kesehatan berkualitas, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Sementara itu, strategi jangka panjang mengarah ke transformasi ekonomi-sosial yang berkelanjutan. Reformasi fiskal menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pidatonya harus ditempuh dengan cara *collecting more, spending better*, dan *innovative financing*. Pertama, *collecting more* merupakan salah satu kebijakan untuk melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, bisnis, dan lingkungan. Salah satu upaya pemerintah yang sampai dengan saat ini dilakukan adalah reformasi perpajakan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kedua, *spending better* dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja. Langkah yang bisa dilakukan adalah efisiensi belanja non prioritas, peningkatan akurasi data, dan sinergi program untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas belanja dan layanan publik. Terakhir, pembiayaan harus dilakukan secara inovatif, kehati-hatian, dan berkelanjutan agar dapat menutup defisit dengan aman.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa APBN ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang yang disetujui Presiden dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila DPR tidak menyetujui APBN tersebut maka pemerintah akan menjalankan anggaran tahun lalu. Definisi APBN sendiri menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR terhitung mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

APBN merupakan salah satu instrumen fiskal yang menunjukkan skala prioritas pemerintah dalam penerimaan dan pengeluarannya. Tiga fungsi utama APBN adalah fungsi alokasi anggaran dalam mendorong efisiensi ekonomi, investasi, dan produktivitas, fungsi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di negara dengan penerapan sistem perpajakan yang adil, dan fungsi anggaran sebagai peredam dampak gejolak perekonomian global dan domestik yang terjadi di sebuah negara (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun anggaran tersebut, menjadi pedoman perencanaan kegiatan tahun berikutnya, dan pedoman penilaian realisasi kegiatan (Indra, 2024).

Komponen yang terdapat dalam APBN adalah anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pemerintah menganggarkan pendapatan negara 2025 sebesar Rp3.005.127.683.257.000 yang bersumber terbesar dari Penerimaan Perpajakan, kedua Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan terakhir adalah Penerimaan Hibah. Anggaran pendapatan negara tersebut digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara sebesar Rp3.621.313.743.500.000 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat yang terbesar dan Transfer ke Daerah (TKD). Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja negara akan diupayakan melalui pembiayaan utang, investasi, dan lainnya. Strategi pemerintah dalam menetapkan, menyusun, dan mengelola anggaran sangat menentukan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya. APBN defisit merupakan strategi sebuah negara yang ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan utang sebagai stimulusnya (Indra, 2024).

### Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar (Drucker, 2012). Definisi tersebut mengarahkan efisiensi ke optimalisasi proses untuk meminimalisasi pemborosan. Supriyanto (2024) berpendapat bahwa efisiensi anggaran adalah kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal dalam mencapai hasil maksimal yang diinginkan. Efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan penghematan, namun lebih penting daripada itu yaitu penggunaan anggaran secara benar dan strategis sehingga dapat mencapai output maksimal yang direncanakan, sesuai dengan standar biaya, dan berdampak baik. Efisiensi anggaran dapat diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran (PMK 62, 2023).

Efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat dan kredibel akan membantu negara mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Supriyanto (2024) menjelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemborosan atau inefisiensi. Pertama, melakukan alokasi anggaran berdasarkan kinerja yaitu program-program pemerintah yang berdampak positif bagi masyarakat. Kedua, audit dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan belanja negara yang berujung

pada pemborosan atau inefisiensi. Ketiga, teknologi pengelolaan anggaran yang memadai sehingga tercipta transparansi dan keakuratan, salah satunya dengan *e-budgeting*. Keempat, efisiensi proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dan disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan. Selanjutnya, Supriyono (2024) juga menambahkan beberapa upaya agar hasil dari efisiensi ini bisa maksimal yaitu dengan menentukan prioritas utama dari anggaran, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, inovasi teknologi dalam pelaksanaan program kegiatan, dan harus dilakukan evaluasi dan penyesuaian atas hasil pengelolaan anggaran.

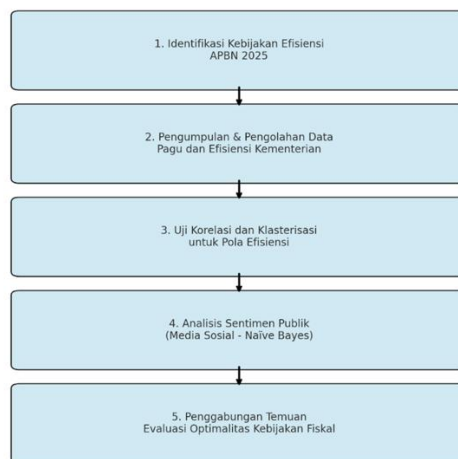
**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan mixed method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif-komputasional untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efisiensi kebijakan fiskal dalam APBN 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara deskriptif evaluatif, penelitian ini mengkaji efisiensi dari sisi internal melalui analisis alokasi anggaran kementerian/lembaga dan dari sisi eksternal melalui persepsi masyarakat. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara pagu dan efisiensi anggaran serta K-Means Clustering untuk mengelompokkan kementerian berdasarkan efisiensinya.

Pendekatan kualitatif-komputasional digunakan untuk menganalisis sentimen publik di media sosial X (Twitter) dengan algoritma Naïve Bayes Classifier. Data dikumpulkan melalui scraping kata kunci tertentu dalam periode Januari–Maret 2025. Proses analisis melibatkan tahap preprocessing teks, konversi ke TF-IDF, pelabelan sentimen, hingga evaluasi performa model klasifikasi menggunakan precision, recall, f1-score, dan confusion matrix. Permasalahan ketimpangan kelas (class imbalance) diidentifikasi sebagai tantangan dalam akurasi model dan menjadi bahan diskusi untuk perbaikan selanjutnya.

Validitas data dijamin melalui penggunaan sumber resmi pemerintah untuk data kuantitatif dan standardisasi NLP untuk data kualitatif. Analisis visualisasi seperti word cloud digunakan untuk melihat fokus perbincangan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Rekomendasi metodologis diajukan untuk meningkatkan keandalan analisis, seperti oversampling, pemilihan algoritma alternatif (SVM, Random Forest), dan optimasi parameter klasifikasi guna meningkatkan kualitas klasifikasi sentimen di masa depan.

Skema Penelitian: Analisis Efisiensi APBN 2025



**Gambar 1. Alur Penelitian**

Sumber : Olah Data Penulis

Alur penelitian pada gambar 1 menggambarkan alur sistematis yang dimulai dari identifikasi kebijakan efisiensi dalam APBN 2025, khususnya kebijakan penghematan anggaran untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu serta efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga. Data ini dianalisis melalui uji korelasi dan klusterisasi guna mengidentifikasi pola efisiensi anggaran antar

kementerian. Di saat yang sama, penelitian ini juga mengumpulkan opini publik dari media sosial dan melakukan analisis sentimen dengan algoritma Naïve Bayes untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Terakhir, seluruh temuan dari dua pendekatan ini digabungkan untuk mengevaluasi apakah kebijakan fiskal yang diambil sudah optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**HASIL PENELITIAN**

Analisis ini dilakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 terhadap nilai efisiensi anggaran yang didasarkan dari INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Berdasarkan Postur APBN Anggaran Tahun 2025 diketahui bahwa postur anggaran terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, nilai keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran dan pembiayaan anggaran.

POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2025 (Miliar Rupiah)		
URAIAN	RAPBN	APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>2.996.870,2</b>	<b>3.005.127,7</b>
I. Penerimaan Perpajakan	2.490.911,6	2.490.911,6
1. Penerimaan Pajak	<b>2.189.307,2</b>	<b>2.189.307,2</b>
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301.604,4	301.604,4
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>505.377,6</b>	<b>513.635,1</b>
III. Penerimaan Hibah	581,1	581,1
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>3.613.056,3</b>	3.621.313,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.693.184,2	2.701.441,6
1. Belanja K/L	<b>976.788,0</b>	1.160.085,0
2. Belanja non-K/L	1.716.396,2	1.541.356,6
II. Transfer ke Daerah	<b>919.872,1</b>	919.872,1
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(63.331,8)	(63.331,8)
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(616.186,1)</b>	(616.186,1)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,53)	(2,53)
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>616.186,1</b>	<b>616.186,1</b>
I. Pembiayaan Utang	775.867,5	775.867,5
II. Pembiayaan Investasi	<b>(154.501,3)</b>	<b>(154.501,3)</b>
III. Pemberian Pinjaman	(5.442,1)	(5.442,1)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	-
V. Pembiayaan Lainnya	262,0	262,0

**Gambar 2. Postur APBN Anggaran 2025**

Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 2 menjelaskan mengenai Postur APBN 2025 yang menunjukkan bahwa pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp2.189,3 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp301,6 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp 513,6 triliun, dengan tambahan penerimaan hibah sebesar Rp 581,1 miliar. Belanja negara direncanakan mencapai Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp1.160,1 triliun, sementara belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun.

Defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun, atau 2,53% dari PDB, yang menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan tambahan untuk menutup kekurangan tersebut. Pembiayaan anggaran yang direncanakan untuk menutup defisit berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp 775,9 triliun, sementara terdapat pembiayaan investasi negatif sebesar Rp154,5 triliun dan pemberian pinjaman sebesar Rp5,4 triliun. Dengan struktur ini, APBN 2025 menekankan keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal

melalui pengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran secara hati-hati. Penelitian ini melakukan analisis uji koreksi yang melihat hubungan nilai efisiensi dengan pagu anggaran, serta klasifikasi menggunakan cluster analysis agar bisa mengetahui klusterisasi kementerian dari nilai efisiensi yang ada.

1. Analisis Uji Korelasi dan Cluster Analyze efisiensi alokasi APBN Era Prabowo

**Tabel 2.** Hasil Uji Korelasi

**Correlations**

		PAGU ANGGARAN	ANGGARAN YANG SUDAH DIEFISIENSI
PAGU ANGGARAN	Pearson Correlation	1	.957**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	78	78
ANGGARAN YANG SUDAH DIEFISIENSI	Pearson Correlation	.957**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	78	78

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber. Olah Data Penulis

Tabel 2 menunjukkan hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pagu Anggaran dan Anggaran yang Sudah Di Efisiensi, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.957. Nilai ini mendekati 1, yang mengindikasikan korelasi positif yang sangat tinggi. Selain itu, nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ( $\alpha = 0.01$ ). Artinya, peluang hubungan ini terjadi secara kebetulan sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pagu anggaran suatu kementerian, semakin besar pula jumlah anggaran yang sudah di efisiensi. Faktor lain yang menyebabkan efisiensi anggaran yang besar dikarenakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan belanja modal, selain itu juga dengan meninjau kembali struktur organisasi dan distribusi pegawai. Pengurangan jabatan yang tidak esensial, optimalisasi penempatan pegawai berdasarkan cost-benefit analysis, serta pemanfaatan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas administratif dapat menjadi solusi dalam mengurangi belanja pegawai secara signifikan. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan jumlah sampel  $N = 78$ , hasil ini memiliki dasar yang kuat dalam analisis efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memiliki pola yang mengikuti besaran pagu anggaran, di mana kementerian dengan anggaran lebih besar cenderung mengalami pemangkasan anggaran dalam jumlah yang lebih besar pula.

**Tabel 3.** Hasil Uji Klusterisasi 1

**Initial Cluster Centers**

	Cluster	
	1	2
PAGU ANGGARAN	1.66E+14	3.90E+9
ANGGARAN YANG SUDAH DIEFISIENSI	1.39E+14	-1.65E+12

Sumber. Olah Data Penulis

Tabel 3 menunjukkan nilai awal pusat (centroid) dari dua kluster yang dibentuk dalam analisis K-Means Clustering. Cluster 1 memiliki Pagu Anggaran sebesar 1.66E+14 (166 triliun) dan Anggaran yang Sudah Di Efisiensi sebesar 1.39E+14 (139 triliun). Sementara itu, Cluster 2 memiliki Pagu Anggaran sebesar 3.90E+9 (3,9 miliar) dan Anggaran yang Sudah Di Efisiensi sebesar -1.65E+12 (-1,65 triliun). Nilai negatif dalam Cluster 2 pada Anggaran yang Sudah

Defisiensi bisa mengindikasikan bahwa terdapat kementerian yang tidak mengalami pemangkasan anggaran atau justru mengalami peningkatan anggaran. Nilai awal ini digunakan sebagai titik awal bagi algoritma clustering untuk menentukan kelompok berdasarkan kemiripan pola anggaran dan efisiensi.

**Tabel 4.** Hasil Uji Klasterisasi 2

**Iteration History<sup>a</sup>**

Iteration	Change in Cluster Centers	
	1	2
1	6.198E+13	8.939E+12
2	1.706E+13	2.703E+12
3	.000	.000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is .000. The current iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 217999566569339.750.

Sumber. Olah Data Penulis

Tabel 4 menunjukkan perubahan posisi pusat cluster pada setiap iterasi dalam proses K-Means Clustering. Pada Iterasi 1, terjadi perubahan besar pada pusat klaster, di mana Cluster 1 mengalami perubahan sebesar 6.198E+13 (sekitar 61,98 triliun) dan Cluster 2 mengalami perubahan sebesar 8.939E+12 (8,93 triliun). Pada Iterasi 2, perubahan semakin kecil, dengan Cluster 1 dan Cluster 2 mengalami perubahan sebesar 1.706E+13 (17,06 triliun) dan 2.703E+12 (2,7 triliun), masing-masing. Pada Iterasi 3, tidak ada lagi perubahan sama sekali (nilai .000), yang berarti algoritma telah mencapai konvergensi, atau dengan kata lain, pusat klaster telah stabil dan tidak berubah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok yang terbentuk sudah optimal.

**Tabel 5.** Hasil Uji Klasterisasi 3

**Final Cluster Centers**

	Cluster	
	1	2
PAGU ANGGARAN	1.08E+14	4.34E+12
ANGGARAN YANG SUDAH DIEFISIENSI	8.93E+13	2.96E+12

Sumber. Olah Data Penulis

Setelah iterasi selesai, pusat klaster akhir ditentukan berdasarkan perhitungan optimal sesuai dengan Tabel 5. Cluster 1 akhirnya memiliki Pagu Anggaran sebesar 1.08E+14 (108 triliun) dan Anggaran yang Sudah Di Efisiensi sebesar 8.93E13 (89,3 triliun). Sementara itu, Cluster 2 memiliki Pagu Anggaran sebesar 4.34E+12 (4,34 triliun) dan Anggaran yang Sudah Di Efisiensi sebesar 2.96E+12 (2,96 triliun). Perubahan dari pusat klaster awal ke pusat klaster akhir menunjukkan bahwa kementerian dikelompokkan berdasarkan pola anggaran dan efisiensi yang lebih realistis, dengan Cluster 1 cenderung memiliki alokasi anggaran yang jauh lebih besar dibanding Cluster 2.

**Tabel 6.** Hasil Uji Klasterisasi 4

Number of Cases in each Cluster		
Cluster	1	7.000
	2	71.000
Valid		78.000
Missing		.000

Sumber. Olah Data Penulis

Tabel 6 menunjukkan jumlah kementerian yang masuk ke dalam masing-masing klaster. Cluster 1 hanya terdiri dari 7 kementerian, sementara Cluster 2 mencakup 71 kementerian, yang berarti mayoritas kementerian memiliki pola anggaran dan efisiensi yang lebih kecil. Total sampel yang dianalisis adalah 78 kementerian, dengan tidak ada data yang hilang atau tidak valid (Missing = 0.000). Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kementerian masuk ke dalam kelompok dengan anggaran lebih kecil, sementara hanya sedikit yang berada dalam kelompok anggaran besar dan efisiensi tinggi.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari analisis clustering ini menunjukkan bahwa kementerian dapat dikelompokkan ke dalam dua klaster berdasarkan Pagu Anggaran dan Anggaran yang Sudah Di Efisiensi. Cluster 1 (7 kementerian) memiliki alokasi anggaran besar dan efisiensi tinggi, sedangkan Cluster 2 (71 kementerian) mencakup kementerian dengan alokasi anggaran lebih kecil dan efisiensi lebih rendah dibanding Cluster 1. Pemisahan ini dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi alokasi anggaran, di mana kementerian dalam Cluster 2 mungkin memerlukan strategi efisiensi yang lebih ketat, sementara kementerian di Cluster 1 perlu ditinjau lebih lanjut untuk memahami bagaimana mereka dapat mengelola anggaran secara lebih optimal.

2. Analisis Sentimen Publik pada Data Efisiensi Anggaran

**Tabel 7.** Evaluasi Klasifikasi Model

Metric	Precision	Recall	F1-Score	Support	Split
negative	0.000000	0.000000	0.000000	62.000000	70:30
positive	0.981057	1.000000	0.990438	3211.000000	70:30
accuracy	0.981057				70:30
macro avg	0.490529	0.500000	0.495219	3273.000000	70:30
weighted avg	0.962473	0.981057	0.971676	3273.000000	70:30
negative	0.000000	0.000000	0.000000	42.000000	80:20
positive	0.980752	1.000000	0.990282	2140.000000	80:20
accuracy	0.980752				80:20
macro avg	0.490376	0.500000	0.495141	2182.000000	80:20

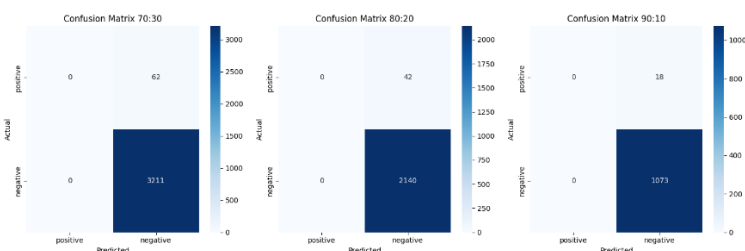
weighted avg	0.961874	0.980752	0.971221	2182.000000	80:20
negative	0.000000	0.000000	0.000000	18.000000	90:10
positive	0.983501	1.000000	0.991682	1073.000000	90:10
accuracy	0.983501				90:10
macro avg	0.491751	0.500000	0.495841	1091.000000	90:10
weighted avg	0.967275	0.983501	0.975321	1091.000000	90:10

Sumber. Olah Data Penulis

Tabel 7 menunjukkan hasil evaluasi klasifikasi model berdasarkan tiga skenario pembagian data: 70:30, 80:20, dan 90:10. Pada ketiga skenario, model memiliki precision, recall, dan f1-score yang tinggi untuk kelas "positive", sementara kelas "negative" memiliki skor nol di semua metrik, yang menunjukkan bahwa model gagal mengklasifikasikan sampel negatif dengan benar.

Akurasi model tetap tinggi di semua skenario, dengan nilai 98,1% pada 70:30, 98,0% pada 80:20, dan 98,3% pada 90:10. Namun, macro average menunjukkan nilai sekitar 0,49 untuk precision dan 0,5 untuk recall, yang mengindikasikan ketidakseimbangan dalam klasifikasi antar-kelas. Nilai weighted average yang tinggi menunjukkan bahwa model sangat bergantung pada performa kelas dominan ("positive").

Kesimpulannya, model memiliki ketepatan tinggi tetapi sangat bias terhadap kelas "positive", menyebabkan semua sampel negatif tidak terklasifikasi dengan benar. Hal ini dapat terjadi akibat ketidakseimbangan data, di mana jumlah sampel "positive" jauh lebih besar daripada "negative", sehingga model tidak cukup belajar untuk mengenali kelas minoritas.



Gambar 3. Confusion Matrix Data Split 70:30, 80:20, dan 90:10

Sumber. Olah Data Penulis

Berdasarkan hasil Gambar 3 yang menunjukkan confusion matrix dari tiga skenario pembagian data (70:30, 80:20, dan 90:10), terlihat bahwa model mengalami ketimpangan klasifikasi, di mana semua data dengan label negative diklasifikasikan dengan benar, sedangkan seluruh data dengan label positive selalu salah diklasifikasikan sebagai negative. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki bias tinggi terhadap kelas negative, yang kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakseimbangan data dan jumlah data negative jauh lebih banyak dibandingkan positive. Pola ini terlihat konsisten di semua skenario pembagian data, menunjukkan bahwa menambah atau mengurangi proporsi data latih dan uji tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil klasifikasi. Untuk meningkatkan performa model, diperlukan beberapa perbaikan, seperti menyeimbangkan dataset melalui teknik oversampling atau undersampling, menggunakan algoritma lain yang lebih kompleks seperti SVM atau Random Forest, serta menyesuaikan parameter model, seperti threshold klasifikasi atau teknik fitur engineering yang



Kesimpulan Umum	Model mengalami overfitting terhadap kelas "positive", sehingga tidak bisa mengenali kelas "negative".	Perbaikan diperlukan, misalnya dengan penyeimbangan dataset (oversampling/undersampling), pemilihan algoritma yang lebih robust, atau tuning hyperparameter untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kedua kelas.
-----------------	--	---

**Evaluasi kebijakan fiskal dan rekomendasi berbasis data dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa yang akan datang.**

Evaluasi terhadap efisiensi APBN 2025 menunjukkan bahwa kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun memiliki korelasi kuat/positif dengan besaran pagu anggaran kementerian, di mana semakin besar alokasi anggaran suatu kementerian, semakin tinggi pula nilai efisiensi yang dilakukan. Klasterisasi K-Means membagi kementerian ke dalam dua klaster utama, dengan hanya 7 kementerian yang termasuk dalam kelompok dengan efisiensi tinggi dan alokasi besar, sementara 71 lainnya menunjukkan pola efisiensi lebih kecil. Temuan ini mencerminkan bahwa efisiensi belum merata di seluruh unit kerja pemerintah, dan ada potensi inefisiensi pada kementerian dengan pagu kecil yang mungkin luput dari pengawasan fiskal yang lebih ketat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kinerja dalam alokasi anggaran sebagaimana diusulkan oleh Hartono (2025), serta penerapan prinsip *spending better* yang digaungkan oleh Kementerian Keuangan dalam strategi fiskal jangka menengah (Badan Kebijakan Fiskal, 2024).

Dari sisi sosial-politik, analisis sentimen publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan program Makan Bergizi Gratis menunjukkan dominasi persepsi positif pula. Namun, ketidakseimbangan data menyebabkan bias model terhadap kelas positif, sehingga suara negatif yang merefleksikan kritik atau kekhawatiran terhadap program ini tidak teridentifikasi secara optimal. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang mengalihkan dana secara masif ke program sosial seperti MBG tetap memerlukan transparansi, evaluasi berbasis hasil, serta partisipasi publik yang lebih luas. Perlu adanya langkah strategis ke depan sebagai bentuk pengawasan dalam penggunaan alat ukur efisiensi berbasis output sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana *progress* efisien yang terjadi. Selain itu, reformasi fiskal perlu dilanjutkan dengan prinsip *collecting more* dan *innovative financing* agar belanja negara tidak hanya efisien, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan transformasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Adapun beberapa rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Fiskal dalam hal efisiensi APBN 2025 antara lain :

1. Penerapan Sistem Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) Pemerintah perlu memperkuat mekanisme alokasi anggaran berbasis kinerja, bukan hanya berdasarkan pagu historis. Hasil klasterisasi menunjukkan ketimpangan efisiensi antar kementerian, di mana sebagian besar kementerian belum menunjukkan efisiensi optimal meskipun telah dilakukan pemangkasan. Dengan mengaitkan penganggaran dengan capaian *output* dan *outcome*, kementerian terdorong untuk menggunakan anggaran secara strategis dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *value for money* dalam manajemen keuangan publik.
2. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Program Prioritas Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Mengingat MBG menjadi program unggulan yang menyerap alokasi dari efisiensi lintas kementerian, pemerintah perlu memastikan adanya kerangka kerja yang terukur untuk memantau keberhasilan program serta transparansi pengeluaran atas program MBG di semua daerah yang bisa diakses oleh publik dalam jangka waktu periode jangka pendek dan jangka panjang. Saat ini belum terdapat *blueprint* formal terkait indikator keberhasilan MBG. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian Keuangan dan lembaga teknis terkait untuk menyusun indikator hasil dan manfaat yang dapat dievaluasi secara berkala misalnya terhadap pengaruh

terhadap penurunan stunting, capaian target sasaran, dan nilai kuantitatif lain sebagai bukti.

3. Optimalisasi Teknologi untuk Efisiensi dan Transparansi (*e-Budgeting & AI-based Monitoring*)

Pemerintah dapat memperluas pemanfaatan teknologi informasi, seperti *e-budgeting* dan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) sehingga bisa dilihat dan dianalisis secara mudah oleh publik, hal ini bertujuan untuk memantau realisasi anggaran dan mendeteksi anomali pemborosan secara *real time* sehingga mengurangi bahkan menghilangkan potensi terjadinya korupsi. Hal ini penting agar proses efisiensi tidak hanya terjadi di awal penganggaran, tetapi juga selama pelaksanaan anggaran berlangsung.

4. Penyempurnaan Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

Meskipun analisis sentimen menunjukkan dominasi persepsi positif, bias data menunjukkan bahwa suara negatif atau kritik masyarakat belum tergambar secara utuh. Pemerintah perlu membuka ruang partisipatif yang lebih luas tanpa adanya anti kritik, termasuk membangun sistem umpan balik publik (*public feedback loop*) baik secara *direct* maupun *indirect* misalnya dari sosial media atau web dalam setiap kebijakan fiskal strategis. Hal ini juga akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan di mata masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan di publik.

5. Diversifikasi Sumber Pembiayaan yang Berkelanjutan dan Inovatif

Untuk menjaga kesinambungan fiskal, kebijakan *innovative financing* seperti obligasi sosial (*social bonds*) atau skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan program sosial. Ini akan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara dan memperluas keterlibatan pemangku kepentingan non-negara dalam program prioritas seperti MBG.

Kelima rekomendasi ini bersandar pada hasil empiris dalam penelitian, serta mendukung prinsip-prinsip yang diusung oleh Kementerian Keuangan seperti *collecting more, spending better, and financing innovatively* (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Jika diterapkan dengan konsisten, kebijakan fiskal Indonesia akan semakin adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan jangka panjang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2025, khususnya pemangkasan sebesar Rp 306,69 triliun yang dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), memiliki korelasi yang sangat kuat dengan besaran pagu anggaran kementerian. Hasil uji korelasi dan klusterisasi mengindikasikan bahwa kementerian dengan anggaran besar cenderung mengalami efisiensi yang lebih tinggi, sedangkan mayoritas kementerian dengan pagu lebih kecil menunjukkan efisiensi yang rendah atau bahkan tidak signifikan. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas output, agar efisiensi tidak hanya sekadar penghematan anggaran, melainkan pengelolaan anggaran yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program prioritas nasional.

Di sisi lain, hasil analisis sentimen publik terhadap kebijakan ini menunjukkan dominasi persepsi positif terhadap program MBG dan efisiensi anggaran. Namun, keterbatasan model dalam mendeteksi sentimen negatif akibat ketidakseimbangan data menandakan perlunya peningkatan kapasitas model serta perbaikan dalam komunikasi publik pemerintah. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal di masa depan perlu ditopang oleh penguatan transparansi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam monitoring anggaran, serta inovasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung program prioritas nasional. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat dijadikan pilar utama dalam menciptakan tata kelola fiskal yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan jangka panjang Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., Yogyakarta, U. P., Bantul, K., & Istimewa, P. D. (2025). *Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis*. 3(1), 370–383.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Laporan tahunan Badan Kebijakan Fiskal: Ketahanan ekonomi modal utama membangun negeri*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dapat diakses di [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1716178459\\_final\\_kem\\_ppkf\\_2025\\_ve\\_rsi\\_publish.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1716178459_final_kem_ppkf_2025_ve_rsi_publish.pdf)
- Drucker, P. (2012). *The practice of management*. Routledge.
- Hartono, H. (2025). *Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025*. Indonesian Research Journal on Education, 5(2), 493-499.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*.
- Indra. (2024). *Kenalan dengan APBN*. Kemenkeu: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Irawan, E. (2023). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, 2(2), 01-08.
- Juhro, S. M., Narayan, P. K., & Iyke, B. N. (2022). *Understanding monetary and fiscal policy rule interactions in Indonesia*. Applied Economics, 54(45), 5190-5208.
- Margono, H., & Sharma, S. C. (2006). *Efficiency and productivity analyses of Indonesian manufacturing industries*. Journal of Asian Economics, 17(6), 979-995.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. Dapat diakses di [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1716178459\\_final\\_kem\\_ppkf\\_2025\\_ve\\_rsi\\_publish.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1716178459_final_kem_ppkf_2025_ve_rsi_publish.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Efisiensi Anggaran dalam Pemerintahan Presiden Prabowo: Reformasi Struktur Pegawai sebagai Solusi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*. Dapat diakses di <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf>
- Madjid, Nurcholis. (2012). *Kebijakan Fiskal dan Penyusunan APBN*. Kementerian Keuangan RI: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan..
- Pidato Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Pengantar Dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. Rapat Paripurna DPR RI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-62-tahun-2023>.
- Sitanggang, A., Umidah, Y., dan Adam, R. I. (2024). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Program Makan Siang Gratis Pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4902>
- Sudirman, I. W., & SE, S. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.
- Wongkar, M., & Angdressey, A. (2019). *Sentiment analysis using Naive Bayes Algorithm of the data crawler: Twitter*. In 2019 Fourth international conference on informatics and computing (ICIC) (pp. 1-5). IEEE.

